

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERIKANAN

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek Dinas Perikanan Tahun 2022, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2022, serta untuk tercapainya efektivitas dalam pekerjaan perlu adanya Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Tahun 2022 ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimukhtahirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2025;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026;
11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Renja Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2022.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2022

Bab V : Penutup, berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022.

Keempat : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026.

- Kelima : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam : Kepala Dinas Perikanan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh : Renja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku maka Renja Dinas Perikanan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022.
- Kesembilan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal, 30 Juli 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



ZAKIMIN, S.Pi
NIP. 19690204 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022. Renja ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain rencana kerja tahun 2022, dalam dokumen Renja ini juga dijelaskan hasil atau capaian kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Perikanan tahun 2020 dan evaluasi tahun 2021 atau tahun berjalan dari triwulan I sampai triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Natuna pada masa sekarang dan yang akan datang.

Ranai, 30 Juli 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



H. ZAKIMIN, S.Pi

NIP. 19690204 199803 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..	26
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	27
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2020 Dan 2021 ..	11
Tabel II.2. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020	15
Tabel.III.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022..	27
Tabel.IV.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dari penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan tujuan organisasi serta cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi lebih bersifat dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari semua organisasi utamanya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Menindaklanjuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana kerja (Renja) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah

yang bersangkutan. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini merupakan satu dokumen yang akan mengarahkan pelayanan dan pembangunan daerah di bidang perikanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan serta akan menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu: (1) kemana pelayanan Dinas Perikanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai di tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
3. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65).
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 34);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2022.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada tahun 2022;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,** berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;** berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2022.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;** berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2022
- Bab V : Penutup,** berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Natuna adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2020 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) tujuan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang tersebar dalam 7 (tujuh) kegiatan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan dengan baik. Dimana pada tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.050.773.417,- yang direalisasikan sebesar Rp. 5.686.425.486,- atau 93,98%, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 4.979.458.252,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.572.013.991,- atau 91,82%. Total anggaran yang dikelola sebesar Rp. 11.030.231.669,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.258.439.477,- atau 93,00%.

1. Belanja Tidak Langsung

Alokasia anggaran sebesar Rp. 6.050.773.417,- yang direalisasikan sebesar Rp. 5.686.425.486,- (93,98%) pada belanja Tidak Langsung ini dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai yang meliputi:

a. Gaji dan Tunjangan

Alokasi anggaran untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.527.512.632,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.501.856.467,- (98,98%) digunakan untuk membiayai Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPH, Pambulan Gaji, Iuran Asuransi Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.

b. Tambahan Penghasil PNS

Alokasi anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 3.523.260.785,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.184.569.019,- (90,39%). Tambahan Penghasilan PNS (TPP) dipergunakan untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang besarnya disesuaikan dengan jabatan dari pegawai. Sedangkan tambahan penghasilan berdasarkan objek lainnya diperuntukkan dalam membiayai makanan dan minuman harian pegawai, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Belanja Langsung

Alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 4.979.458.252,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.572.013.991,- atau 91,82%, yang terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.783.767.574,- dan direalisasi sebesar Rp. 1.591.090.925,- atau 89,20%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 11 (sebelas) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa meningkatnya kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran selama tahun 2020.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 258.097.971,- dan direalisasi sebesar Rp. 204.406.935,- atau 79,20%, Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa optimalisasi sarana dan prasarana kantor baik pemeliharaan maupun penambahan sarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.473.400,- dan direalisasi sebesar Rp. 13.186.700,- atau 61,41%, Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dialokasikan sebesar Rp. 23.522.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.000,- atau 99,18%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa tersedianya laporan akuntabilitas keuangan dan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dinas tahun 2020.

5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini dialokasikan sebesar Rp. 108.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.173.533,- atau 90,26%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 (satu) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa volume produk olahan hasil perikanan tahun 2020.

6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini dialokasikan sebesar Rp. 774.497.277,- dan terealisasi sebesar Rp. 745.362.598,- atau 96,24%. Anggaran

tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2020.

7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini dialokasikan sebesar Rp. 2.009.336.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.896.463.300,- atau 94,38%. Anggaran tersebut dipergunakan berasal dari APBD Kabupaten Natuna dan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan dengan sasaran capaian program berupa jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2020.

Selain melihat capaian-capaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, capaian Renstra Dinas Perikanan sampai tahun 2021 atau tahun berjalan juga dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana capaian Renstra Dinas Perikanan pada sampai dengan tahun 2021. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.1
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 DAN 2021

KODE	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2021 (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
											I		II										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4.A	5		6		7		8		9		10 = 8+9		11 = 10/7x100		12 = 6+10		13 = 12/5x100		14
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/Predikat	80	250,000,000	75.67	176,777,345	80	77,189,240	-	-	-	-	-	0	0	75.67	176,777,345.00	95	70.71		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/Predikat	80	250,000,000	75.67	176,777,345	80	77,189,240	0.00	-	-	-	0	-	0	75.67	176,777,345.00	95	70.71		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	10	250,000,000	8.00	176,777,345	2	77,189,240	0.00	-	-	-	-	0	0	8.00	176,777,345.00	80	70.71		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	866,888,000	60	603,427,500	12	91,663,420	3.00	13,199,000.00	3.00	12,774,000.00	6	25,973,000.00	50.00	28.34	66	629,400,500	181.94	72.60	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	866,888,000	60	603,427,500	70	91,663,420	3.00	13,199,000.00	3.00	12,774,000.00	71	25,973,000.00	101.4285714	28.34	131	629,400,500	181.94	72.60	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	420	866,888,000	519	603,427,500	70	91,663,420	39.00	13,199,000.00	32.00	12,774,000.00	71	25,973,000.00	101.43	28.34	590	629,400,500	140.48	72.60	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	9,845,726,924	60	6,084,643,926	12	753,368,996	3.00	15,468,800.00	3.00	53,847,839.00	6.00	69,316,639.00	50	9.20	66	6,153,960,365.00	91.67	62.50	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	9,845,726,924	60	6,084,643,926	12	753,368,996	3.00	15,468,800.00	3.00	53,847,839.00	6.00	15,468,800.00	50.00	2.05	66	6,100,112,726.00	91.67	61.96	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Luasan gedung kantor yang dipelihara	M2	125	271,720,000	125	272,439,000	125	26,073,000	125	4,038,000.00	125	4,059,000.00	125	8,097,000.00	100.00	31.06	125.00	280,536,000.00	100.00	103.24	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pegawai dan tamu	Orang	720	1,422,000,000	808	466,179,000	126	11,000,000	0	-	-	-	0	-	0	808	466,179,000.00	112.22	32.78		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	Eksemplar	433,214	576,980,000	371,578	389,659,700	72,120	61,957,656	8,441	3,060,800.00	18,633	11,197,900.00	27,074	14,258,700.00	37.54	23.01	398,652	403,918,400.00	92.02	70.01	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	Eksemplar	49	97,250,000	88	72,720,000	10	25,200,000	0	-	31.00	4,600,000.00	31.00	4,600,000.00	310.00	18.25	119	77,320,000.00	242.86	79.51	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OK	2,889	7,477,776,924	1,979	4,883,646,226	47	629,138,340	8	8,370,000.00	13.00	33,990,939.00	21	42,360,939.00	44.68	6.73	2,000	4,926,007,165.00	69.23	65.88	

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022

KODE	SASARAN	URUSAN/BIKANG URUSAN PEMERINTAHAN/PRO GRAM/KEGIATAN/SU B KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2021 (%)				REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
											I		II												
											1	2	3	4											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RENJA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	6,467,881,650	60	4,860,213,706	12	863,955,200	3	154,000,000	3	206,178,000.00	6	360,178,000.00	50	41.69	66	5,220,391,706.00	91.67	80.71			
		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	72	6,467,881,650	60	4,860,213,706	12	863,955,200	3	154,000,000	3	206,178,000	6	360,178,000	50	41.69	66	5,220,391,706	91.67	80.71			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	72	231,678,000	60	140,620,200	12	24,400,000	3	1,000,000	3	3,861,000	6	4,861,000	50	19.92	66	145,481,200	91.67	62.79			
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	1,362,329,000	60	709,478,704	12	143,683,000	0	-	6	40,917,000	6	40,917,000	50	28.48	66	750,395,704	91.67	55.08			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honoror/PTT	Orang	249	4,873,874,650	208	4,010,114,802	42	695,872,200	33	153,000,000	32	161,400,000	65	314,400,000	155	45.18	273	4,324,514,802	109.64	88.73			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	85	4,251,422,500	100	1,438,686,760	75	220,703,244	5	11,408,646	20	43,342,326	25	54,750,972	33.33	24.81	125	1,493,437,732.00	147.06	35.13			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	85	4,251,422,500	100	1,438,686,760	75	220,703,244	5	11,408,646	20	43,342,326	25	54,750,972	33.33	24.81	125	1,493,437,732	147.06	35.13			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang dipelihara	Unit	260	3,623,922,500	320	1,213,616,760	48	166,133,244	34.00	11,408,646	94.00	31,402,326	128.00	42,810,972	267	25.77	448	1,256,427,732	172.31	32.86			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	72	427,500,000	88	225,070,000	12	54,570,000	0.00	-	16.00	11,940,000	16.00	11,940,000.00	133.33	21.88	104	237,010,000	144.44	55.44			
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	571,406.15	33,379,160,050	120,583.24	23,974,505,070.00	132,541.62	856,056,220.00	26,238.92	23,018,900.00	37,824.97	3,580,000.00	64,063.89	26,598,900.00	48.33	3.11	184,647.13	24,001,103,970	32.31	71.90			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	571,406.15	33,379,160,050	120,583	23,974,505,070	132,542	856,056,220	26,238.92	23,018,900.00	37,824.97	3,580,000.00	64,063.89	26,598,900.00	48.33492302	3.11	184,647	24,001,103,970	32.31	71.90			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jenis	26	33,379,160,050	23	23,974,505,070	2	856,056,220	0	23,018,900.00	-	3,580,000.00	0	26,598,900.00	-	3.11	23	24,001,103,970	88.46	71.90			

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022

KODE	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PRO- GRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2016 S/D 2021 (PERIODE RENSTRA PD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI RENJA PD TAHUN 2020		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA 2021 (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH
											I		II										
											1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10 = 8+9	11 = 10/7x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp RENJA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14,419.92	25,500,932,000	23,412.16	4,762,053,897	3,984.82	1,018,196,005	381.02	23,320,800,000	1,581.28	54,281,940,000	1,962.30	77,602,740,000	49.24	7.621591483	25,374.46	4,839,656,637	175.97	18.98	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	14,419.92	25,500,932,000	23,412.16	4,762,053,897	3,984.82	1,018,196,005	381.02	23,320,800,000	1,581.28	54,281,940,000	1,962.30	77,602,740,000	49.24	7.62	25,374.46	4,839,656,637	175.97	18.98	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis prasarana perikanan budidaya	Jenis	64	22,300,932,000	24	4,656,265,897	5	849,864,050	0	1,830,000	-	20,724,490,000	-	22,554,490,000	0	2.65	24.00	4,678,820,387	37.5	20.98	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perikanan budidaya	Jenis	8	3,200,000,000	2	105,788,000	2	168,331,955	2	21,490,800,000	2.00	33,557,450,000	2	55,048,250,000	100.00	32.70	4	160,836,250,000	50.00	5.03	

Dari hasil evaluasi di atas, ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya pada triwulan II sudah mencapai 100% dan ada beberapa program dan kegiatan yang realisasi kinerjanya masih 0% atau belum ada progress sama sekali, hal ini dikarenakan adanya target kinerja yang sudah dilaksanakan pada triwulan II serta adanya target kinerja yang dilaksanakan pada triwulan III atau IV. Meskipun demikian, target dan realisasi kinerja Dinas Perikanan sampai dengan triwulan II masih berjalan dengan baik.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada tahun 2020 relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2020, semuanya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan kelautan dan perikanan tergolong baik. Untuk lebih jelasnya terkait target kinerja, capaian dan realisasi keuangan Dinas Perikanan yang mengacu pada Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2020 yang bersumber dari APBD maupun DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.2
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang tersedia	Rp	25.522.000	22.297.000	87,36
		Output : Jumlah Bulan Surat Masuk dan Keluar	Bulan	12	12	100
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Input : Dana yang tersedia	Rp	130.913.780	72.147.000	55,11
		Output : Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	Bulan	12	12	100
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp	55.414.500	53.332.000	96,24
		Output : Luas Gedung Kantor Yang diPelihara	m ²	125	125	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp	95.000.000	88.350.000	93,00
		Output : Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	Jenis	70	249	355,71
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang tersedia	Rp	55.840.600	48.567.000	86,97
		Output : Jumlah Bahan-bahan Cetak dan Fotocopy	Eksamplar	72.120	80.726	111,93
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp	18.490.000	16.092.000	87,03
		Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	150	10	6,66
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia	Rp	25.000.000	18.900.000	75,60
		Output : Jumlah bahan-bahan bacaan Pegawai	Eksamplar	10	52	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang tersedia	Rp	7.440.000	4.696.000	63,11
		Output : Jumlah Pegawai dan Tamu	Orang	124	252	203,23
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Input : Dana yang tersedia	Rp	193.920.650	173.108.241	89,26
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	170	20	11,76
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Input : Dana yang tersedia	Rp	880.455.044	829.693.784	94,23
		Output : Jumlah Tenaga P3K	Orang	42	42	100
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
	11. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Input : Dana yang tersedia	Rp	295.771.000	263.907.900	89,22
		Output : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OK	310	93	30,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Outcome : Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp	214.472.971	167.926.935	78,29
		Output : Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	Unit	46	132	286,95
		Outcome : Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp	43.625.000	36.480.000	83,62
		Output : Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	Jenis	12	40	333,33
		Outcome : Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur	Input : Dana yang tersedia	Rp	21.473.400	13.186.700	61,40
		Output : Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus Keterampilan	Orang	5	1	20,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Outcome : Meningkatnya Kemampuan, Kualitas dan Kinerja Aparatur	Bulan	12	12	100
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang tersedia	Rp	23.522.000	23.330.000	99,18
		Output : Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan	1	1	100
		Outcome : Nilai Evaluasi LAKIP	Nilai	67	74,36	110,99
5.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Input : Dana yang tersedia	Rp	108.764.000	98.173.533	90,26
		Output : Jumlah Kelompok Yang di Bina	Jenis	5	-	-
		Outcome : Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	129,79	139,44	107,43
6.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Input : Dana yang tersedia	Rp	279.143.277	266.581.400	95,49
		Output : Jumlah Kelompok Yang di Bina	Orang	130	130	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Pengembangan BBIP	Outcome : Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.338,80	3.727,80	111,65
		Input : Dana yang tersedia	Rp	378.380.000	372.993.198	98,57
		Output : Jumlah Bibit Ikan Yang di Hasilkan	Ekor	19.000	13,800	72,63
	3. Penyediaan Pakan Mandiri dan Obat Ikan	Outcome : Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.338,80	3.727,80	111,65
		Input : Dana yang tersedia	Rp	116.974.000	105.788.000	90,43
		Output : Jumlah Jenis Pakan Mandiri dan Obat Ikan	Jenis	2	2	100
7.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Outcome : Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.338,80	3.727,80	111,65
		Input : Dana yang tersedia	Rp	157.152.140	127.090.100	80,87
		Output : Jumlah Nelayan Perikanan Yang Terbina	Orang	200	53	26,50
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DAK Bidang Kelautan dan	Outcome : Produksi Perikanan Tangkap	Ton	118.541,62	120.583,25	101,72
		Input : Dana yang tersedia	Rp	1.313.911.080	1.595.360.200	121,42
		Output : Jumlah Jenis sarana dan prasarana Produksi perikanan	Jenis	4	4	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA				
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perikanan)	Tangkap				
		Outcome : Produksi Perikanan Tangkap	Ton	118.541,62	120.583,25	101,54
	3. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	Input : Dana yang tersedia	Rp	100.315.000	75.083.000	74,84
		Output : Jumlah SDM Perikanan Tangkap Yang Terampil dan Terlatih	Orang	25	25	100
		Outcome : Produksi Perikanan Tangkap	Ton	118.541,62	120.583,25	101,72
	4. Identifikasi dan Inventarisasi Identitas Nelayan Perikanan	Input : Dana yang tersedia	Rp	100.286.000	98.930.000	98,64
		Output : Jumlah Kecamatan Yang di Identifikasi dan Inventarisasi Nelayan Perikanan	Orang	15	10	100
		Outcome : Produksi Perikanan Tangkap	Ton	118.541,62	120.583,25	101,72

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menyusun perencanaan strategis dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang kondisi daerah agar perencanaan suatu program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Informasi yang jelas akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala serta solusi dalam pembangunan terutama di bidang perikanan.

Adapun sejumlah kendala yang di hadapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna antara lain :

- Kurangnya sumber daya manusia (SDM), Keterampilan dan pendidikan rendah di kalangan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan;
- Industri pengolah, sarana prasarana perikanan masih terbatas terlebih di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan;
- Minimnya permodalan nelayan;
- Terbatasnya sarana prasarana penangkapan ikan, pada umumnya nelayan Natuna masih tergolong nelayan kecil dengan armada penangkapan ≤ 5 GT dan menggunakan alat penangkapan ikan yang masih tradisional;
- Tidak adanya kewenangan pengawasan di tingkat kabupaten;
- Untuk itu Realitas pembangunan perikanan Kabupten Natuna hendaknya lebih diprioritaskan pada sektor-sektor perikanan seperti :
 - Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dengan peningkatan SDM dengan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat nelayan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana perikanan seperti pembangunan pelabuhan perikanan terpadu, industri pengolah, dan pusat perbenihan;
 - Pengembangan industri perikanan terpadu rumput laut;

- Pengembangan perikanan tangkap dalam rangka alih teknologi dari tradisional menuju modernisasi perikanan tangkap;
- Peningkatan upaya pengawasan dan perlindungan dalam upaya memerangi *illegal fishing* serta upaya konservasi dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- Penguatan kelembagaan serta permodalan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan RPJMD. Renja tahun 2022 secara umum telah sesuai dengan anggaran yang disediakan, karena penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perikanan yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain kelembagaan yang ada di masyarakat, pemuda dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didiskusikan kembali di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan. Pembahasan juga dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 sesuai dengan misi Presiden yang termasuk dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan terutama bidang kelautan dan perikanan yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Selain mengacu pada RPJMN, pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus diselaraskan dengan Renstra Perubahan Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024. Dimana dalam mencapai salah satu agenda pembangunan Presiden yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Dalam mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai misi :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP

- b. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP

Dilihat dari kebijakan nasional dalam pembangunan yang telah ditetapkan, serta Renstra Perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan dapat diselaraskan terutama untuk menunjang visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya memiliki tujuan untuk mengoptimalkana pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP, yang berkaitan dengan target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yaitu jumlah produksi perikanan yang terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta jumlah produksi olahan produk perikanan yang harus dicapai setiap tahunnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu). Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun yang telah direncanakan.

Dalam meningkatkan ekonomi sektor perikanan, target yang telah ditetapkan Dinas Perikanan pada tahun 2022 dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL.III.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	(Ton)	138.587,41
		Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	(Ton)	418,90
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Predikat/ Nilai	BB/76
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,46

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural*** yang dijabarkan dalam beberapa misi, Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi kedua yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan.***

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Natuna ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui

program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana yang terurai dibawah ini.

➤ **Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Kegiatan :

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan :

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pengadaan Mebel;
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan :

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;

Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**Kegiatan :**

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.
2. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan :

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**Kegiatan :**

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan :

- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah menyusun kebutuhan anggaran guna mendukung capaian kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2022. Adapun kebutuhan anggaran tahun 2022 yang telah disusun dapat dilihat pada tabel matrik Renja Dinas Perikanan Tahun 2022 dibawah ini.

TABEL.IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2022	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB	Persen	30.81	30.91	2,653,790,711
2.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN (TON)	Ton	410.69	418.90	600,000,000
2.1.1.1.1.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	174.43	2.00	600,000,000
2.1.1.1.1.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	5	0	-
2.1.1.1.1.06.2.01.01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	0	-
2.1.1.1.1.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	1.42	2.68	200,000,000
2.1.1.1.1.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	10	200,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	10	6	400,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha	Ton	5.332,22	5.483 ,86	-

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2022	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
2.1.1.1.1.06.2.03 .02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	2	400,000,000
2.1.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN (TON)	Ton	1 36.678,02	1 38.587,41	2,053,790,711
2.1.1.1.1.1.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	9.99	1.39	1,200,000,000
2.1.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	134.481,33	500,000,000
2.1.1.1.1.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4	3	500,000,000
2.1.1.1.1.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	37.78	11.57	700,000,000
2.1.1.1.1.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	135	30	425,000,000
2.1.1.1.1.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	160	20	275,000,000
2.1.1.1.1.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	47	0	-
2.1.1.1.1.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	0	-
2.1.1.1.1.03.2.03.01.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0	0	-
2.1.1.1.1.03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	-
2.1.1.1.1.1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	8.53	1.50	853,790,711
2.1.1.1.1.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	10	251,000,000
2.1.1.1.1.04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	44	10	251,000,000
2.1.1.1.1.04.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	4	0	-
2.1.1.1.1.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses	Kelompok	45	0	-

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2022	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
	dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
2.1.1.1.1.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.106,08	602,790,711
2.1.1.1.1.04.2.04.01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-
2.1.1.1.1.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	3	602,790,711
2.1.1.1.1.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	0	-
6.1.1.1.1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	Nilai	75.67	76.00	100,000,000
6.1.1.1.1.1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI LAKIP	Nilai/Predikat	75.67	76.00	100,000,000
6.1.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	75.67	76	100,000,000
6.1.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	75.67	76	100,000,000
6.1.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,000,000
6.1.1.1.2.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.44	4.1	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	3.46	3.46	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	80	80	8,292,289,617
6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	5,394,614,317
6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	48	5,394,614,317
6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	84	0	-
6.1.1.2.1.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	0	-
6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	0	-
6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian	Persentase Kehadiran	Persen	95	95	-

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2022	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah	Pegawai				
6.1.1.2.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-
6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	77	1,541,764,600
6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	7	604,404,150
6.1.1.2.1.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1	44,160,450
6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	22,000,000
6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	51,200,000
6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	25,000,000
6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	95,000,000
6.1.1.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	80	700,000,000
6.1.1.2.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	-
6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	76	-
6.1.1.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	38	0	-
6.1.1.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	290	0	-
6.1.1.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	117	0	-
6.1.1.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	-
6.1.1.2.1.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	-
6.1.1.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	76	966,775,300
6.1.1.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	14,400,000
6.1.1.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	259,010,000
6.1.1.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	38	693,365,300
6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	76	389,135,400

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2022	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	39	231,135,400
6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	0	-
6.1.1.2.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	80,000,000
6.1.1.2.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	78,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas Dinas Perikanan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural dan fungsional di Dinas Perikanan agar dapat mengawal pelaksanaan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2022 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perikanan diharapkan dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2022, maka penetapan

prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang telah ditetapkan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.